

TESIS

**KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN
BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**



AGNES VISCA HEMASKESUMA WIDODO

NIM: 12124007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2026

TESIS

KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN
BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

Diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program Studi

Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya



AGNES VISCA HEMASKESUMA WIDODO

NIM : 12124007

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal

Oleh:
Pembimbing


Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama

PRO PATRIA


Dr. Miftahul Huda, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini Telah direvisi
Pada tanggal,

Oleh :

Pembimbing



Dr. Tahessa Primananda Alfath, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama

PRO PATRIA



Dr. Miftahul Huda, S.H., M.H

AGNES VISCA HEMASKESUMA W

TESIS

PADA TANGGAL : 2 FEBRUARUI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua :
Dr. NYNDA FATMAWATI O, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota :
Dr. TAHEGGA PRIMANANDA A S.H., M.H
PRO PATRIA

Anggota :
Dr. MIFTAKHUL HUDA, SH, MH
SURABAYA



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Achel Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website: www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : Agnes Visca Hemaskesuma Widodo, S.H

No. Induk Mahasiswa : 12124007

Program Studi Angkatan : Magister Ilmu Hukum / Angkatan 55

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Pengawasan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Sebagai Regulator Dalam Penetapan Dan Pencairan Jaminan Reklamasi Di Sektor Pertambangan.
2. Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasa Undang-Undang 3 Tahun 2020

Isu Hukum :

Khususnya dalam Pasal 35 Ayat (4) dan Pasal 173C Ayat (1) rumusan dalam praktik hukum dan administrasi dimana perizinan dan jaminan yang dulu di inisiasi daerah perlu ditindak lanjuti oleh pusat, terdapat kekaburan dan kekosongan norma hukum yang tidak menjelaskan tata langkah apa yang harus dilakukan setelah masa transisi berakhir serta bagaimana alih kewenangan itu harus dikelola secara praktis maupun teknis.

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

Dr. Tahega Primananda Alfath, S.H., M.H

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

Surabaya, 14 Agustus 2025
Mahasiswa

Agnes Visca Hemaskesuma Widodo



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Agnes Visca Hernakesuma Widodo

No. Induk Mahasiswa : 12124007

Judul : Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

PRO PATRIA

Surabaya, 14 Agustus 2025

Calon Pembimbing,


Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya, Telp.(031)-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa serta setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

- | | | |
|------|--|--|
| I. | Nama Mahasiswa
Nomor Induk Mahasiswa
Program Studi | : Agnes Visca Hemaskesuma Widodo
: 12124007
: Magister Ilmu Hukum |
| II. | Judul Tesis | : Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 |
| III. | Nama Pembimbing | : Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H. |

Disetujui oleh Dewan Tesis,
Di Surabaya Pada Tanggal ... 10 Agustus 2020

Ketua,

Dr. Moh Saleh, S.H., M.H.

Sekretaris,

Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS *Narotama*



FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT PENUGASAN

No.696/NR.FH/03/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM/Prodi	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. Tahegga Primandana Alfath, S.H., M.H	12124007/ Magister Hukum	AGNES VISCA HEMASKESUMA WIDODO	Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambahan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang- Undang 3 Tahun 2020

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. 4



UNIVERSITAS *Nardiana*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website: www.nardiana.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Agnes Visca Hemaskesuma Widodo
No. Induk : 12124007
Alamat : Jl. Padat Karya Perum Puspita Bengkuring Blok H No. 3 Samarinda
Kalimantan Timur
Telp/HP : 082237013848
Pembimbing : Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H
Judul Tesis : Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan
Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi Pasca
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tgl Dimulai : 02 September 2025

Surabaya, 10 Oktober 2025
Mahasiswa

Pembimbing


Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H



Agnes Visca H.W

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Perumusan Judul dan Isu Hukum	02-09-2025	
2.	Perumusan Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian Hukum	07-10-2025	
3.	Kajian Pustaka, Kerangka Teori, dan Konsep Hukum	14-10-2025	
4.	Metodologi Penelitian Hukum	20-10-2025	
5.	Sistematika Penulisan Proposal, Rencana Penelitian, dan Persiapan seminar Proposal Tesis	28-10-2025	

PRO PATRIA

Syarat:

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*
FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1 - Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 - Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S1 - Akreditasi B)

Jl. Arif E. Rachman, Halim, Sepatan, St. Nurjaya, ...
Telp: (031) ... 1946434, 5995578, Fax: ...
Website: narotama.ac.id, Email: dekan@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi / Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa:

1. Nama Mahasiswa AONES VISCA HEMASKEBUMA W
2. NIM 12124007
3. Judul Skripsi / Tesis Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang 3 Tahun 2020

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 19 JANUARI 2026

Mengetahui,

PRO PATRIA

Dr Miftakhul Huda, S.H., M.H
Ketua Dewan Skripsi dan Tesis

Dr. Tegga Pramananda A, S.H., M.H
Sekretaris Dewan Skripsi dan Tesis

Dekan,



... S.H., M.H.



Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : Agnes Visca Hemaskesuma Widodo

No. Induk Mahasiswa : 12124007

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / Angkatan 55

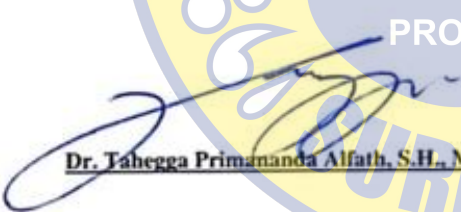
Dengan ini mengajukan permohonan **UJIAN PROPOSAL TESIS** pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**“Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan
Kepada Pemerintah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”**

Menyetujui Untuk Diuji
Pembimbing,

Surabaya, 29, ~~OCTOBER~~, 2020.
Kapodi,

PRO PATRIA


Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap (Sampul warna merah)
3. Copy kwitansi pembayaran Tesis



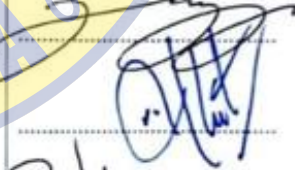
UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

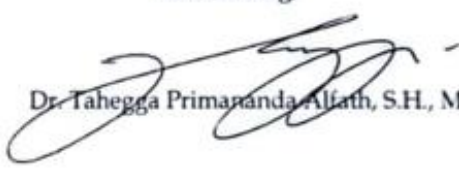
Persetujuan Perbaikan Penilaian Proposal Tesis

NAMA : AGNES VISCA HEMASKESUMA WIDODO
N I M : 12124007
Tanggal Penilaian :
Judul Tesis : Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan
Berusaha Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
Pembimbing : Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H	
SEKRETARIS	Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H	
ANGGOTA	Dr. Nynda Fatmawati O, S.H., M.H	

Surabaya, 7 November 2025
Pembimbing,


Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Agnes Visca Hemaskesuma Widodo

No. Induk Mahasiswa : 12124007

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1.	HABIB ANIKAR	JAMINAN SOSIAL BAGI ATLET BELA DIRI YANG MENALAMI CEDERA	5/11/2024	<i>[Signature]</i>
2.	KEVY IEDARA RENDI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA UMIGRAN	5/11/2024	<i>[Signature]</i>
3.	EKO PEREYAWAN ARIFIN	KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA DALAM PENGELOMPOKAN KANDANGAN TANPA RESEK	5/11/2024	<i>[Signature]</i>
4.	MILANI FEBRINA	KEMERONGGONGAN GANTI RUGI OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA	5/11/2024	<i>[Signature]</i>
5.	NIKEN ARIEF RAHAYUWATI	KEMERONGGONGAN PENGAWASAN SIPRAN LANGSUNG PEMERINTAH RIUTAN MK	5/11/2024	<i>[Signature]</i>
6.	M. FARHAN A	RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGORBANAN LINGKUNGAN HIDUP	5/11/2024	<i>[Signature]</i>
7.	SEPTIAN LUKY K	KESETARAAN DIHADAPAN HUKUM TERHADAP PERSISWAKAN PIDANA (EQUALITY BEFORE THE LAW IN CRIMINAL PROCEEDINGS)	5/11/2024	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,
Ketua Program Studi

[Signature]
Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

Surabaya, 5 November 2025
Mahasiswa

[Signature]
Agnes Visca Hemaskesuma W



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Agnes Visca Hemaskesuma Widodo
No. Induk : 12124007
Alamat : Jl Padat Karya Perum Puspita Bengkuring Blok H No. 3
Kec. Samarinda Utara Kel. Sempaja Selatan Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur
Telp/HP : 0822-3701-3848
Pembimbing : Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.
Judul Tesis : KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN
PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020
Tgl Dimulai : 30 September 2025

Pembimbing

Surabaya, 20 Januari 2026
Mahasiswa

Dr. Tahegga Primananda A. S.H., M.H.

Agnes Visca H. W.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Pembahasan struktur Bab II dan landasan teori.	11-11-2025	
2	Pendalaman teori dan konsep hukum Bab II.	18-11-2025	
3	Kerangka konseptual dan konsistensi istilah Bab II.	25-11-2025	
4	Finalisasi Bab II.	02-12-2025	
5	Sistematika dan analisis awal Bab III.	09-12-2025	
6	Pendalaman analisis hukum Bab III.	16-12-2025	
7	Finalisasi Bab III.	23-12-2025	
8	Sistematika Bab IV dan kerangka kesimpulan.	06-01-2026	
9	Penyusunan kesimpulan penelitian.	13-01-2026	
10	Penyusunan saran penelitian.	09-01-2026	
11	Review Bab II, Bab III, dan Bab IV.	13-01-2026	
12	Finalisasi tesis dan persiapan ujian tesis.	20-01-2026	

Syarat :

1. Pengajuan seminar Proponet Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali.
2. Diperbolehkan Semipon setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)
 Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)
 Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
 Telepon 031 - 5946404, 5995578 Fax 031 - 5931213
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh@fh.narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi / Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa:

1. Nama Mahasiswa AGNES VISCA HEMASKESUMA W
2. NIM 12124007
3. Judul Skripsi / Tesis Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang 3 Tahun 2020

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 19 JANUARI 2026

PRO PATRIA
Mengetahui,


Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H
 Ketua Dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahegga Pramananda A, S.H., M.H
 Sekretaris Dewan Skripsi dan Tesis

Dekan,




Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : Agnes Visca Hemaskesuma Widodo

No. Induk Mahasiswa : 12124007

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 55

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Kriteria Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 20.....
Mahasiswa

PRO PATRIA

Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Agnes Visca H. W

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Tesis dilakukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus memuat:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500
3. Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : Agnes Visca Hemaskesuma Widodo
NIM : 12124007
Tanggal Penilaian :
Judul Tesis : KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN
PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
Pembimbing : Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., M.Kn.	
ANGGOTA	Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.	

Surabaya,
Pembimbing,

Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 2 FEBRUARI 2026

Yang membuat pernyataan,


METERAN
TAMPEL
E3SD5AMX217968027

Agnes Visca Hemaskesuma Widodo

NIM. 12124007

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul **“KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020”**. Isu hukum dalam penelitian ini adalah :

1. Penentuan kriteria dalam pendelegasian kewenangan dalam memberikan perizinan berusaha pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
2. Akibat atas penarikan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Sebagaimana dengan isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan historis (*historis approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. langkah penelitian tesis ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut, penulis mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer bahan hukum sekunder, selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan

analisis dan disimpulkan. Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam kriteria pendelegasian pemberian perizinan ini yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pengawasan dalam menjalankan delegasi tersebut tercantum juga pada Perpres Nomor 55 tahun 2022 untuk Gubernur memberikan penugasan pada Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan untuk dapat mengawasi jalannya kegiatan operasional. Dan kriteria pendelegasian yang diberikan pusat kepada daerah untuk melakukan penerbitan pemberian izin ini tergolong ke dalam usaha pertambangan Galian C. Pembagian tersebut dibagi menjadi 3 bagian yakni pemberian sertifikat standar, izin, dan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha.
2. Akibat yang muncul akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yakni adanya sentralisasi kekuasaan yang dimana kewenangan untuk dapat mengelola kegiatan usaha pertambangan yang diberikan kepada pemerintah pusat dari semula kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah provinsi, dan hal tersebut menyebabkan adanya ketidak seimbangan dalam peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dimana pembagian kewenangan usaha pertambangan untuk memberikan izin usaha pertambangan bertumpu pada pemerintah pusat dan menghilangkan kewenangan dan peran dari pemerintah daerah.

Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian atas isu hukum diatas maka saran dari penulis yaitu :

1. Dalam pembagian kriteria pendelegasian kewenangan pemberian perizinan usaha pertambangan perlu adanya pemberian izin dan *double check* atau verifikasi dua kali dalam pemberian izin juga dalam sertifikat standar dan mekanisme pendelegasian agar dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan dan pemberian izin khususnya bagi pemerintah daerah.
2. Berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari penarikan kewenangan pemberian perizinan berusaha yaitu mengarah kepada paradigma sentralisasi maka paradigma desentralisasi perlu di kembalikan sebagai bentuk otonomi daerah.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kriteria pendelegasian kewenangan dalam pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta mengkaji akibat hukum dari penarikan kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi yang mengakibatkan terjadinya sentralisasi kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan terhadap isu hukum yang dikemukakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan perizinan pertambangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional pertambangan. Selain itu, pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan terbatas pada usaha pertambangan bahan galian C. Penarikan kewenangan perizinan usaha pertambangan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat mengakibatkan perubahan pengelolaan kewenangan yang sebelumnya berada pada pemerintah daerah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Kata kunci: Pendelegasian, Kewenangan, Pertambangan.

ABSTRACT

This study analyzes the criteria for the delegation of authority in granting business licenses in the mining sector following the enactment of Law Number 3 of 2020, as well as examines the legal consequences of the withdrawal of licensing authority by the central government from provincial governments, which has resulted in the centralization of authority. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches. The collection and processing of legal materials are conducted through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed to draw conclusions regarding the legal issues raised. The results of the study indicate that the criteria for the delegation of authority in the implementation of mining licensing are regulated under Presidential Regulation Number 55 of 2022, which grants governors the authority to assign Mining Inspectors and Mining Supervisory Officials to oversee mining operational activities. Furthermore, the delegation of authority from the central government to regional governments in the issuance of mining business licenses is limited to Class C mineral mining activities. The withdrawal of mining business licensing authority from provincial governments to the central government results in a shift in the management of authority that was previously held by regional governments, thereby causing an imbalance in roles between the central government and provincial governments.

Keywords: Delegation, Authority, Mining.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020**”.

Dalam proses penelitian tesis ini, penulis banyak sekali mengalami hambatan dan tantangan. Namun atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Maka dengan ini penulis ingin memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diterima penulis dimulai dari awal dilaksanakan hingga diselesaikannya tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Assoc. Prof. Dr. Arasy Alimudin, SE., MM., selaku Rektor Universitas Narotama.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama.
3. Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama.
4. Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan baik dari segi waktu dan dukungan moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

5. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, beserta staff Fakultas Hukum Universitas Narotama atas segala bimbingannya saat menempuh studi di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama.
6. Untuk, Papa saya Sarwo Widodo dan Mama saya Maria Magdalena, terimakasih telah menyebut nama saya dalam setiap doa-doamu, kasih sayang, dan motivasi, serta dukungan materil lainnya, maaf telah banyak merepotkan. Semoga sehat selalu agar tetap bisa menemani langkah saya selanjutnya.
7. Untuk, Saudara saya Valen dan Tasya, terimakasih telah banyak membantu dalam setiap langkah proses saya dalam menempuh masa perkuliahan, maafkan telah banyak merepotkan.
8. Untuk, Pak Rian Dosen Narotama terimakasih untuk bantuan dan dukungan moril kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Untuk, Teman kuliah seperjuangan mas Anwar yang telah membantu penulis selama kuliah semoga kita semua menjadi orang-orang yang berguna untuk sesama dalam segala aspek dikemudian hari.
10. Teman-teman diluar kampus, Bang Adam, Audy, Zahira, Dedy, terimakasih telah banyak membantu dan memberikan support kepada penulis.
11. Terakhir sebelum penulis akhiri, “Beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri” kata-kata yang pernah penulis baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini. Terimakasih banyak

kepada Agnes Visca Hemaskesuma Widodo selaku penulis, sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Adapun kurang lebihmu, mari kita rayakan diri sendiri.

MOTTO

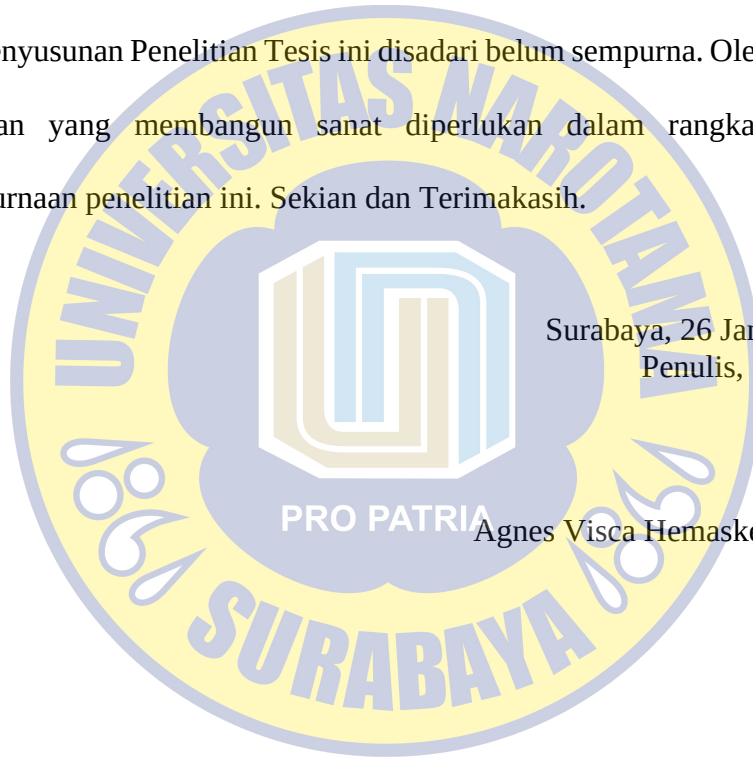
“Saya membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin saya tidak ada artinya”

Penyusunan Penelitian Tesis ini disadari belum sempurna. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini. Sekian dan Terimakasih.

Surabaya, 26 Januari 2026

Penulis,

Agnes Visca Hemaskesuma Widodo



DAFTAR ISI

TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI	iii
LEMBAR TIM PENGUJI TESIS.....	iv
FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS	v
FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS	vi
FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS.....	vii
SURAT PENUGASAN	viii
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS	ix
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT	xi
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL TESIS.....	xii
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS	xiii
KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI PROPOSAL TESIS	xiv
KARTU BIMBINGAN TESIS PRO PATRIA.....	xv
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH TESIS	xvii
FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS	xviii
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS.....	xix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	xx
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1

1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1.5.1 Teori Kewenangan.....	10
1.5.2 Asas Desentralisasi.....	12
1.5.3 Asas Dekonsentrasi	13
1.5.4 Tinjauan Umum Mengenai Perizinan Berusaha.....	14
1.5.5 Tinjauan Mengenai Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	16
1.6 ORISINALITAS PENELITIAN	18
1.7 METODE PENELITIAN.....	21
1.7.1 Tipe Penelitian.....	22
1.7.2 Pendekatan Masalah	22
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	24
1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	26
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	26
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN	27
BAB II KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020	
2.1 Kerangka Konseptual Tentang Perizinan Pertambangan Di Indonesia	31
2.1.1 Prinsip Yang Menjadi Kriteria Utama Dalam Kewenangan Perizinan Pertambangan	31
2.1.2 Asas Hukum Yang Melandasi Pendelegasian Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	34
2.2 Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Pertambangan Di Indonesia.....	36

2.2.1 Bentuk-Bentuk Izin Usaha Pertambangan di Indonesia	36
2.2.2 Hak dan Kewajiban Penanaman Modal Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	40
2.2.3 Perbandingan Kewenangan dan Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Lama dan Undang-Undang Baru	42
2.3 Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022	46
2.3.1 Pendelegasian Pemberian Sertifikat Standar dan Izin	46
2.3.2 Pembinaan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara	47
2.3.3 Pengawasan Atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara	48
2.4 Kriteria Pendelegasian Kepada Pemerintah Daerah Untuk Menjalankan Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha	50
2.4.1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Izin Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	52
 BAB III AKIBAT ATAS PENARIKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DARI PEMERINTAH DAERAH PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020	
3.1 Perubahan Kewenangan Pertambangan Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	53
3.1.1 Peran Pemerintah Provinsi dalam Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	53
3.1.2 Kontribusi Daerah dalam Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	55
3.2 Implikasi Hukum Sentralisasi Perizinan Pertambangan	57
3.2.1 Perubahan Pembagian Kewenangan (Resentralisasi)	58
3.2.2 Dampak Terhadap Kewenangan dan Produk Hukum di Pemerintahan Daerah	60
3.2.3 Pergeseran Fungsi Pengawasan dan Pemerintahan	64
3.3 Penguatan Peran Daerah Yang Ideal Sebagai Rekomendasi Kebijakan	68

3.3.1 Mitigasi Potensi Konflik Kewenangan Antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Teknis dan Non Teknis Pertambangan	68
3.3.2 Pembagian Kewenangan Yang Ideal di Sektor Pertambangan Untuk Mencapai Keseimbangan antara Kepentingan Nasional (Pusat) dan Hak Otonomi Daerah (Lokal).....	71
3.3.3 Rekomendasi Kebijakan yang Diperlukan Untuk Memperkuat Peran Partisipatif Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Pertambangan ...	74
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	

